



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/26/KUM/2026
TENTANG

PENETAPAN PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dilakukan penambahan atau pengurangan dalam tahun berjalan.
- KETIGA : Penambahan atau pengurangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/26/KUM/2026
TENTANG
PENETAPAN PERENCANAAN PENYUSUNAN
PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

NO	JUDUL RANPERBUP	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
1	Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	Pedoman Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor	Pedoman Teknis Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Dinas Sosial
4	Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Penempatan Pedagang di Pasar Milik Daerah Hulu Sungai Selatan	Pedoman, Prosedural dan Administrasi Penempatan Pedagang	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya dan	Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya dan Surat Tanda	Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor 37/Kpts/Pl.400/03/2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budi daya (STD-B)	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan

	Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan		
6	Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah	Pedoman dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
7	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan	Pedoman dalam Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2026	Pelaksanaan Pemenuhan Administrasi Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.	Sekretariat DPRD
9	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta	- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

	2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Tata kerja Unit Pelaksana Teknis	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
10	Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Taknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis	- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
11	Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis	- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 54 Tahun 2025 Tentang	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

	Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan		Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
12	Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis	- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 54 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
13	Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis	- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan,	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

	dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
14	Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Prasarana dan Sarana Olahraga pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis	- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
15	Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis	- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Kedudukan,	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

	Pelaksana Teknis Pembibitan dan Pengembangan Ternak Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan		Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	
16	Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis	- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
17	Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Lokal Kandangan Dinas Perikanan	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis	- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

	Kabupaten Hulu Sungai Selatan			
18	Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kios Pangan Memukau pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis	- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
19	Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kandangan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis	- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 66 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
20	Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

	Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Negara pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 66 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
21	Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis	- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 66 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
22	Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis	- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

	Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Logam Nagara Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, usaha kecil, dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan		- Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 66 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
23	Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Hubungan Kerja	- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 76 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Staf Ahli	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
24	Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
25	Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

	78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Tata kerja Unit Kecamatan	Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	
26	Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain	Pedoman dalam Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
27	Pedoman Pelaksanaan Sewa Kendaraan Dinas	Pedoman Pelaksanaan Sewa Kendaraan Dinas	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
28	Penyelamatan Arsip Akibat Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pedoman dalam Penyelamatan Arsip Akibat Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

30	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Batas Administrasi BPKPD	- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) - Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial - Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
31	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Masa Manfaat dan Penyusutan Barang Milik Daerah	Pedoman dalam Penentuan dan Perhitungan Masa Manfaat dan Penyusutan Barang Milik Daerah	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah - Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
32	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pedoman dalam Implementasi Manajemen Risiko di Lingkup di lingkungan Pemerintah Daerah	- Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah - Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan	Inspektorat Daerah

			Risiko pada Pemerintah Daerah	
33	Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Inspektorat Daerah
34	Penyelenggara an Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Terintegrasi	Instrumen strategis untuk mengintegrasikan pengembangan kompetensi, manajemen talenta, manajemen kinerja, manajemen pengetahuan, dan pengembangan karier aparatur sipil negara secara berkelanjutan	Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (<i>Corporate University</i>)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35	Batas Kecamatan Loksado	Batas Administrasi Kecamatan	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
36	Batas Kecamatan Telaga Langsat	Batas Administrasi Kecamatan	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
37	Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pedoman Teknis Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kab. HSS	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
38	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

	3 Tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren	Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren		
39	Kurikulum Muatan Lokal Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kurikulum Muatan Lokal	Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Muatan Lokal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
40	Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat	Pedoman Struktur, Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
41	Pemberdayaan Lembaga Adat Dan Penyelesaian Sengketa Adat	- Pemberdayaan Dan Pembinaan Lembaga Adat - Pengaturan Penyelesaian Sengketa Adat	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
42	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
43	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil	Perubahan Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembagian Dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD), Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD), dan Bantuan	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	Retribusi Daerah dan bantuan keuangan tahun anggaran 2025.	Keuangan Tahun Anggaran 2025	Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	
44	Penyelenggaraan Sistem Order E-Marketplace Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Penyelenggaraan SiOpen HSS	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Permerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
45	Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> Tahun 2025-2029	Pedoman pelaksanaan rencana aksi daerah TPB/SDGs Tahun 2025-2029 yang memuat arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, target, indikator, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembiayaan pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
46	Rencana Kerja Pemerintah	Pedoman pelaksanaan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun	Badan Perencanaan

	Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2027 yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah, sasaran pembangunan daerah, kaidah pelaksanaan, serta pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD Tahun Anggaran 2027.	2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.	Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
47	Pedoman Program Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pedoman Program Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 23 2014 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah 2019 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 - Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

			- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 1 Tahun 2025	
--	--	--	--	--

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR